

ABSTRAK

MULTILEVEL GOVERNANCE DAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI UNI EROPA (STUDI KASUS: EUROPEAN UNION TIMBER REGULATION 2005-2015)

Penelitian ini membahas kebijakan lingkungan UE dalam memberantas pembalakan liar dan perdagangan terkaitnya. Meskipun menjanjikan, kerjasama bilateral FLEGT-VPA nyatanya memiliki sejumlah kekurangan. Hal ini pada akhirnya mendorong UE merumuskan regulasi baru yaitu *European Union Timber Regulation* (EUTR). Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara rinci proses pembentukan kebijakan EUTR dari sudut pandang *multilevel governance* dan negosiasi multilateral. Dari pandangan *multilevel governace*, tulisan ini menjelaskan empat tahap pembedukan kebijakan EUTR: (1) perumusan kebijakan, (2) pengambilan keputusan, (3) implementasi, (4) dan adjudikasi. Penulis menemukan bahwa pengesahan EUTR melibatkan aktivitas multi aktor dalam setiap tahap pembentukan kebijakannya. Kebulatan suara merupakan syarat pengesahan EUTR secara resmi pada saat pengambilan keputusan namun lembaga UE justru berada pada perbedaan pendapat, sementara NGO dan masyarakat berupaya mempengaruhi dengan memperjuangkan kepentingannya, sehingga memperpanjang perdebatan di level UE. Melalui pembicaraan *trilogue*, yang penulis anggap sebagai bentuk negosiasi multilateral, diantara Parlemen, Dewan, dan Komisi akhirnya tercapai kompromi yang membuka jalan terciptanya kesepakatan bersama atas EUTR. Untuk menghasilkan analisa yang relevan, metode penelitian kualitatif dan *process tracing* diterapkan dalam penelitian ini dan sumber data didapat melalui studi kepustakaan.

Kata kunci: UE, Pembalakan Liar, Kebijakan Lingkungan, *Multilevel Governance*, Negosiasi Multilateral

ABSTRACT

MULTILEVEL GOVERNANCE AND ENVIRONMENTAL POLICY MAKING IN THE EUROPEAN UNION (CASE STUDY: EUROPEAN UNION TIMBER REGULATION 2005-2015)

This research explores EU environmental policies to halt illegal logging and its associated trade. Despite being promising, the bilateral FLEGT-VPA agreement turns out to have limitations. Eventually, the EU is set to draft a new regulation that is the European Union Timber Regulation (EUTR). This study aims to describe in detail the process of EUTR policymaking through multilevel governance and multilateral negotiation perspectives. From the multilevel governance, this paper emphasizes the four stages of EUTR policymaking: (1) policy initiation, (2) decision making, (3) implementation, (4) and adjudication. The enactment of EUTR involves multi-actors activity at each stage of its policy making. Unanimity becomes a challenge to formally adopt the EUTR during decision making as the EU bodies share opposite intentions, at the same time NGO and civil society seek to influence by promoting their interests, therefore prolonging the heated debate at the EU level. It takes trilogue meetings, which is considered as a form of multilateral negotiation, among the Parliament, the Council, and the Commission to finally reach a compromise agreement and send a clear signal that the EUTR measures stand on unanimous. To deliver relevant analysis, qualitative research and process tracing methods are applied in this study, and data sources are obtained from library research.

Keywords: EU, Illegal Logging, Environmental Policy, Multilevel Governance, Multilateral Negotiation